

**LKJIP  
TAHUN 2023**



**LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA  
SUMBAWA BESAR**

**Jalan Lintas Sumbawa – Bima KM 07 Kelurahan Samapuin  
Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa Nusa Tenggara Barat**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Berdasarkan peraturan Menteri Negara Pendayagunaan aparatur Negara dan reformasi birokrasi nomor 29 tahun 2010 tentang pedoman penyusunan penetapan kinerja dan pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dilakukan penyempurnaan sehingga dapat meningkatkan fungsinya sebagai salah satu instrumen untuk menjadikan instansi Pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya. terwujudnya transparansi instansi Pemerintah. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Dan terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah (LKJIP) Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sumbawa Besar tahun 2022 dimaksudkan sebagai perwujudan peran serta Lembaga Pemasyarakatan untuk mewujudkan akuntabilitas dan pencapaian kinerja dalam pelaksanaan visi dan misi yang telah ditetapkan. Dan juga dimanfaatkan sebagai alat untuk memperbaiki kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sumbawa Besar ditahun yang akan datang.

#### **A. Latar Belakang dan profil Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sumbawa Besar**

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sumbawa Besar adalah tempat / sarana yang disediakan oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk memberikan pelayanan hukum dan pembinaan kepada narapidana yang melakukan tindak pidana yang telah divonis oleh Pengadilan, berfungsi sebagai bagian dari alat hukum untuk menegakkan hukum di Indonesia.

Sebagai Unit Pelaksana Teknis di Bidang Pemasyarakatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Barat berkewajiban untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistim, kelembagaan dan cara

pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam cara peradilan pidana (UU.No.12 Tahun 1995) bahwa petugas Pemasyarakatan adalah petugas penegak hukum yang berarti kita termasuk didalamnya suatu bagian dari integrated criminal justice sistem dengan tugas membina para pelanggar hukum/WBP agar kelak mereka dapat kembali ketengah-tengah kehidupan masyarakat dan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dan pada akhirnya dapat berprestasi serta berperan aktif dalam pembangunan bangsa dan Negara. Oleh karena itu pembinaan yang dilaksanakan sesuai dengan kondisi lingkungan dimana WBP nantinya akan kembali ketengah-tengah masyarakat.

Untuk menunjang keberhasilan pembinaan selain didukung oleh petugas dan warga binaan pemasyarakatan, salah satu unsur yang tidak kalah pentingnya adalah dukungan masyarakat. Oleh karena itu dalam pelaksanaan tugas kita juga mengikut sertakan dan menjalin hubungan kerja sama yang harmonis dengan masyarakat baik yang berada dilingkungan kita maupun dengan instansi-insatansi pemerintah, swasta dan sebagainya.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sumbawa Besar mulai dibangun tahun 1999 dan selesai tahun 2001 terletak dijalan raya jurusan Bima Km.07 merupakan Lembaga Pemasyarakatan baru pindahan dari gedung Lembaga Pemasyarakatan yang lama di jalan Ki Hajar Dewantara nomor 12 yang saat ini dialih fungsikan menjadi Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara Sumbawa Besar.

Gedung Lembaga Pemasyarakatan Sumbawa Besar ini diresmikan dan dioperasikan tanggal 12 Agustus 2004, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sumbawa Besar telah ditempati/difungsikan lebih kurang 13 tahun lamanya

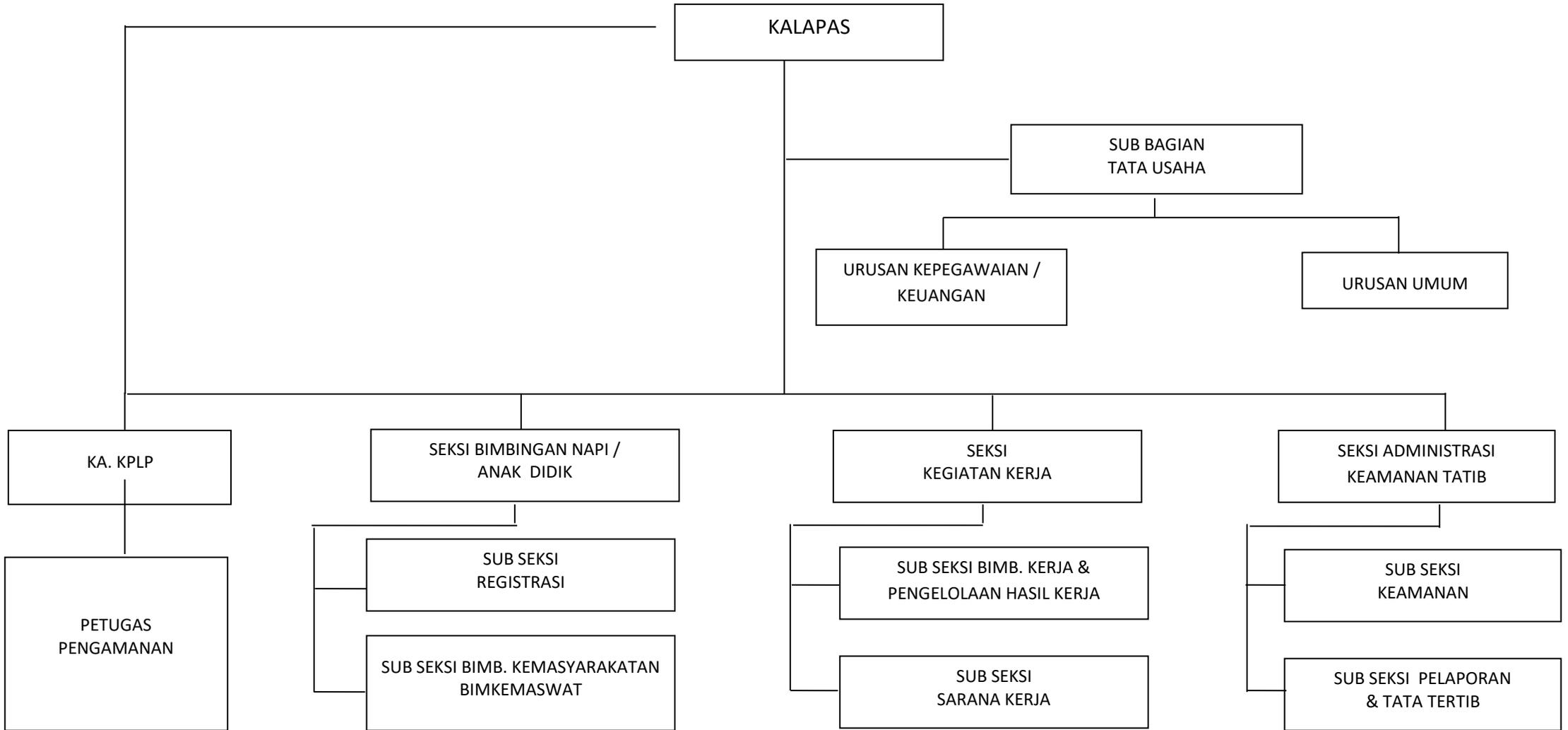
## B. Tugas pokok dan Fungsi.

| TUGAS                                       | FUNGSI   |
|---|--|
| Melaksanakan pemasyarakatan narapidana/anak | melakukan pembinaan narapidana/anak didik                            |
|   | Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja |
|   | Melakukan bimbingan sosial/kerohaniannarapidana/anak didik           |
|   | Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib LAPAS                |
|   | Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga                         |

### C. Struktur Organisasi

| <b>STRUKTUR ORGANISASI</b>  | <b>FUNGSI</b>   |
|-----------------------------|---|
| Bagian Tata Usaha           | Melakukan urusan kepegawaian, keuangan, surat-menyurat, perlengkapan dan rumah tangga   |
| Bidang Pembinaan Narapidana | Melakukan registrasi, statistik dan dokumentasi sidik jari narapidana; memberikan bimbingan masyarakat; mengurus kesehatan dan perawatan narapidana/anak didik  |
| Bidang Kegiatan Kerja       | Memberikan bimbingan latihan kerja; mempersiapkan fasilitas sarana kerja; mengelola hasil kerja   |
| Bidang Administrasi Kamtib  | Mengatur jadwal, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan; menerima laporan harian dan berita acara dr satuan pengaman yg bertugas  |
| Kesatuan Pengamanan Lapas   | Melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap narapidana; melakukan pemeliharaan kamtib; melakukan pengawalan penerimaan, penempatan dan pengeluaran narapidana; melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran keamanan; membuat laporan harian dan berita acara pelaksanaan pengamanan. |

**STRUKTUR ORGANISASI LEMBAGA PEMASYARAKATAN  
KLAS IIA SUMBAWA BESAR**





Sesuai Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor: M.HH.05.OT.01.01 tahun 2010 tanggal 30 Desember 2010 Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sumbawa Besar mempunyai struktur organisasi sebagai berikut:

1. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sumbawa Besar dipimpin oleh M. FADLI, A.Md.IP., S.Sos., MM
2. Kepala Sub Bagian Tata usaha dipimpin oleh Muhamad Pauzan, S.Sos membawahi:
  - Kepala Urusan Kepegawaian/Keu. ( Husni Thamrin, S.A.P)
  - Kepala Urusan Umum ( LALU SATRIA JAGAT, S.Ag )
3. Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP) dipimpin oleh Sofian Hadi Sasmita, AMd.IP, SH. MH , membawahi:
  - Petugas Pengamanan
4. Kepala Seksi Bimbingan Napi/Anak Didik dipimpin oleh Muhammad Setiadin, A.Md.IP., SH membawahi:
  - Kepala Sub Seksi Registrasi ( SITI NURMA, SH )
  - Kepala Sub Seksi Bimkemaswat ( AHMADAN ).
5. Kepala Seksi Kegiatan Kerja, dipimpin oleh Andi Oloan Sibarani, A.Md.IP., SH., MH membawahi:
  - Kepala Sub Seksi Bimbingan Kerja dan Pengelolaan Hasil Kerja (Muhammad Fahrurroji, S.Tr. Pas)
  - Kepala Sub Seksi Sarana Kerja (AGUS SALIM)
6. Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib, dipimpin oleh I KETUT MUSTIKA, S.Sos, membawahi:
  - Kepala Sub Seksi Keamanan (PANCAWATI, SH)
  - Kepala Sub Seksi Pelaporan. ( ANWAR, SH ).

PERMASALAHAN-PERMASALAHAN:

| <b>SUB ORGANISASI</b>        | <b>PERMASALAHAN</b>  |
|------------------------------|--|
| Kepala Sub Bagian Tata Usaha | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kurang aktifnya pegawai dalam memasukkan data dirinya kedalam SIMPEG.</li> <li>- Kurangnya SDM untuk operator SAIBA dll.</li> <li>- Kurangnya sarana dan prasarana kerja dalam melaksanakan tugas.</li> <li>- Terlambatnya proses penghapusan barang dari pejabat berwenang.</li> </ul> |
| Kepala KPLP                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kurangnya sarana prasarana keamanan</li> <li>- Minimnya petugas Jaga</li> <li>- Kurang sarana prasarana penunjang seperti X - Ray.</li> </ul>   |
| Kepala Seksi Binadik         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kurangnya sarana dan prasarana untuk mendukung Sistim Database Pemasarakatan.</li> <li>- Kurangnya petugas dalam melaksanakan kegiatan pembinaan.</li> </ul>  |
| Kepala Seksi Kegiatan Kerja  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kurangnya sarana/ peralatan kerja</li> <li>- Tidak terdapat tenaga ahli di bidang kegiatan kerja.</li> </ul>  |
| Kepala Seksi Minkamtib.      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kurangnya sarana/ prasarana Kamtib.</li> </ul>  |

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. Rencana Strategis**

Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan kebijakan dan anggaran, mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: 7 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2015 - 2023 dalam hal ini Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Sumbawa Besar. Target kinerja pada tingkat rencana strategis akan menjadi tolak ukur dalam keberhasilan organisasi didalam pencapaian visi misi seperti terlihat pada lampiran perencanaan kinerja. Didalam Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun 2015-2022 terdapat sasaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dihasilkan.

#### **B. Perjanjian Kinerja**

Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Sumbawa Besar yang memiliki 5 (lima) Seksi, pada tahun 2022 ini telah membuat dan menandatangani Perjanjian kinerja dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Barat, Dokumen perjanjian tersebut berisikan penugasan dari Kepala Kantor Wilayah sebagai pemberi amanah kepada Kepala Lembaga Pemasarakatan,

sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program / kegiatan dengan sasaran masing-masing. Melalui perjanjian ini diharapkan akan terwujud komitmen

dan kesepakatan antara pemberi amanah dan penerima amanah atas kinerja yang terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Tujuan perjanjian ini adalah sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran dan tujuan organisasi; sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi; sebagai dasar melakukan monitoring dan evaluasi atas kemajuan Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Sumbawa Besar. Perjanjian Kinerja Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Sumbawa Besar dapat dilihat dalam lampiran dibawah ini :



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA SUMBAWA BESAR  
DENGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM  
NUSA TENGGARA BARAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : M. Fadli

Jabatan : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sumbawa Besar

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Romi Yudianto

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTB

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mataram, 11 Januari 2023

Pihak Kedua,  
Kepala Kantor Wilayah Kementerian  
Hukum dan HAM NTB



Romi Yudianto  
NIP. 197706261997031001



Pihak Pertama,  
Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas  
IIA Sumbawa Besar



M. Fadli  
NIP. 1962011198000121001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA SUMBAWA BESAR DENGAN**  
**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM**  
**NUSA TENGGARA BARAT**

| No. | Sasaran Strategis  | Indikator Kinerja Utama  | Target |
|-----|--|--|--------|
| (1) | (2)  | (3)  | (4)    |
| 1.  | Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI  | Indeks keamanan dan ketertiban UPT Masyarakat                    | 80     |
| 2.  | Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik                    | Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum. | 80     |
| 3.  | Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional | Persentase menurunnya residivis                                  | 1%     |

| No. | Sasaran Program  | Indikator Kinerja Program   | Target |
|-----|--|---|--------|
| (1) | (2)  | (3)   | (4)    |
| 1.  | Terwujudnya Penyelenggaraan Masyarakat Berkualitas yang  | 1. Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat                               | 85     |
|     |  | 2. Indeks Pelaksanaan Kerjasama Masyarakat                          | 85     |
|     |  | 3. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Masyarakat                   | 85     |
|     |  | 4. Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan | 83     |
| 2.  | Terwujudnya Penyelenggaraan Masyarakat yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM Terhadap Tahanan, Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, Narapidana, Anak, dan Klien Masyarakat | 1. Indeks Keberhasilan Pembinaan Narapidana                         | 56     |
|     |  | 2. Indeks Pemenuhan Hak Narapidana                                  | 92,5   |
| 3.  | Terwujudnya Penyelenggaraan Masyarakat yang Aman dan Tertib  | Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Masyarakat                       | 80     |

| No. | Sasaran Kegiatan  | Indikator Kinerja Kegiatan  | Target |
|-----|---|---|--------|
| (1) | (2)   | (3)   | (4)    |
| 1.  | Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana / Tahanan / Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah | 1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan / Narapidana / Anak sesuai dengan standar                                | 80%    |
|     |   | 2. Persentase Tahanan / Narapidana / Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas                        | 94%    |
|     |   | 3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal             | -      |
|     |   | 4. Persentase Tahanan / Narapidana / Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani                                     | 80%    |
|     |   | 5. Persentase tahanan / narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar                                   | 85%    |
|     |   | 6. Persentase tahanan / narapidana / anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar | 85%    |
|     |   | 7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)    | 80%    |
| 2.  | Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi  | 1. Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian           | 70%    |
|     |   | 2. persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi  | 99%    |
|     |   | 3. persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi   | 85%    |
|     |   | 4. persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan  | 85%    |
|     |   | 5. Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin.                            | 17%    |
|     |   | 6. Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi                                       | 31%    |
|     |   | 7. Persentase narapidana yang bekerja dan produktif   | 72%    |
| 3.  | Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar  | 1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar   | 85%    |
|     |   | 2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah  | 80%    |
|     |   | 3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan / Narapidana / Anak pelaku gangguan kamtib             | 85%    |

| No. | Sasaran Kegiatan                               | Indikator Kinerja Kegiatan  | Target    |
|-----|--|---|-----------|
| (1) | (2)  | (3)   | (4)       |
|     |  | 4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas                              | 80%       |
| 4.  | Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker | 1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu | 1 Layanan |
|     |  | 2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan   | 1 Layann  |
|     |  | 3. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan                                     | 1 Layanan |
|     |  | 4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu           | 1 Layanan |
|     |  | 5. Jumlah Layanan Perkantoran   | 1 Layanan |
|     |  | 6. Jumlah Kendaraan Bermotor  | -         |
|     |  | 7. Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi  | -         |
|     |  | 8. Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran   | -         |
|     |  | 9. Jumlah Gedung / Bangunan   | -         |

| Kegiatan  | Anggaran                   |
|---|----------------------------|
| <b>Program Pelayanan dan Penegakan Hukum</b>            | <b>Rp. 5.219.074.000,-</b> |
| Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah                | Rp. 5.219.074.000,-        |
|   |                            |
| <b>Program Dukungan Manajemen</b>                       | <b>Rp. 6.242.544.000,-</b> |
| Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasarakatan | Rp. 6.242.544.000,-        |

Mataram, 11 Januari 2023

Pihak Kedua,  
Kepala Kantor Wilayah Kementerian  
Hukum dan HAM NTB



Romi Yudianto  
NIP. 197706261997031001



Pihak Pertama,  
Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas  
IIA Sumbawa Besar



M. H. H. H.  
NIP. 19780516300021001





**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN IIA SUMBAWA BESAR DENGAN  
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM  
NUSA TENGGARA BARAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : M. Fadli

Jabatan : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sumbawa Besar

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Mataram, 11 Januari 2023

Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA  
Sumbawa Besar

  
  
M. Fadli  
NIP. 197806162000121001

## **BAB III**

### **PERENCANAAN KINERJA**

1. Capaian Target Perjanjian Kinerja Sasaran Kegiatan *Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana I Tahanan / Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah* Indikator Kinerja Kegiatan *Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan / Narapidana / Anak sesuai dengan standar* per Mei 2023 100 % indeks
2. Capaian Target Perjanjian Kinerja Sasaran Kegiatan *Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana I Tahanan / Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah* Indikator Kinerja Kegiatan *Persentase Tahanan / Narapidana / Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas* per Mei 2023 100 Persen indeks
3. Capaian Target Perjanjian Kinerja Sasaran Kegiatan *Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana I Tahanan / Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah* Indikator Kinerja Kegiatan *Persentase tahanan dan narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal* per Mei 2023 0% indeks
4. Capaian Target Perjanjian Kinerja Sasaran Kegiatan *Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana I Tahanan / Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah* Indikator Kinerja Kegiatan *Persentase Tahanan / Narapidana / Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani* per Mei 2023 0% indeks
5. Capaian Target Perjanjian Kinerja Sasaran Kegiatan *Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana I Tahanan / Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah* Indikator Kinerja Kegiatan *Percentase tahanan / narapidana lansia*

*yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar per Mei 2023 100 Persen indeks*

6. Capaian Target Perjanjian Kinerja Sasaran Kegiatan ***Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana I Tahanan / Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah*** Indikator Kinerja Kegiatan ***Persentase tahanan / narapidana / anak b€rkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar per Mei 2023 0% indeks***
7. Capaian Target Perjanjian Kinerja Sasaran Kegiatan ***Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana I Tahanan / Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah*** Indikator Kinerja Kegiatan ***Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan .jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh) per Mei 2023 100% indeks 2 hiv 2 orang***
8. Capaian Target Perjanjian Kinerja Sasaran Kegiatan ***Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi*** Indikator Kinerja Kegiatan ***Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan<sup>189</sup> pada instrument penilaian kepribadian per Mei 2023 100 Persen indeks yg dinilai***
9. Capaian Target Perjanjian Kinerja Sasaran Kegiatan ***Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi*** Indikator Kinerja Kegiatan ***persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi per Mei 2023 100 Persen indeks***
10. Capaian Target Perjanjian Kinerja Sasaran Kegiatan ***Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi*** Indikator Kinerja Kegiatan ***persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi per Mei 2023 100 Persen indeks***
11. Capaian Target Perjanjian Kinerja Sasaran Kegiatan ***Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi*** Indikator Kinerja Kegiatan ***persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan per Mei 2023 100 Persen indeks***
12. Capaian Target Perjanjian Kinerja Sasaran Kegiatan ***Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi*** Indikator Kinerja Kegiatan ***Persentase Narapidana***

- resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin*  
per Mei 2023 100 Persen indeks
13. Capaian Target Perjanjian Kinerja Sasaran Kegiatan ***Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi*** Indikator Kinerja Kegiatan ***Percentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi*** per Mei 2023 100 Persen indeks
  14. Capaian Target Perjanjian Kinerja Sasaran Kegiatan ***Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi*** Indikator Kinerja Kegiatan ***Persentase narapidana yang bekerja dan produktif*** per Mei 2023 100 Persen indeks
  15. Capaian Target Perjanjian Kinerja Sasaran Kegiatan ***Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar*** Indikator Kinerja Kegiatan ***Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar*** per Mei 2023 100 Persen indeks
  16. Capaian Target Perjanjian Kinerja Sasaran Kegiatan ***Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar*** Indikator Kinerja Kegiatan ***Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah*** per Mei 2023 100 Persen indeks
  17. Capaian Target Perjanjian Kinerja Sasaran Kegiatan ***Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar*** Indikator Kinerja Kegiatan ***Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan / Narapidana / Anak pelaku gangguan kamtib*** per Mei 2023 100 Persen indeks
  18. Capaian Target Perjanjian Kinerja Sasaran Kegiatan ***Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar*** Indikator Kinerja Kegiatan ***Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas*** per Mei 2023 100 Persen indeks
  19. Capaian Target Perjanjian Kinerja Sasaran Kegiatan ***Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker*** Indikator Kinerja Kegiatan ***Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakalan dan pelaporan***

*yang akuntabel tepat waktu* per Mei 2023 100 Persen indeks

20. Capaian Target Perjanjian Kinerja Sasaran Kegiatan ***Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker*** Indikator Kinerja Kegiatan ***Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan*** per Mei 2023 100 Persen indeks
21. Capaian Target Perjanjian Kinerja Sasaran Kegiatan ***Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker*** Indikator Kinerja Kegiatan ***Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakatan*** per Mei 2023 100 Persen indeks
22. Capaian Target Perjanjian Kinerja Sasaran Kegiatan ***Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker*** Indikator Kinerja Kegiatan ***Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu*** per Mei 2023 100 Persen indeks
23. Capaian Target Perjanjian Kinerja Sasaran Kegiatan ***Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker*** Indikator Kinerja ***Kegiatan Jumlah Layanan Perkantoran*** per Mei 2023 100 Persen indeks
24. Capaian Target Perjanjian Kinerja Sasaran Kegiatan ***Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker*** Indikator Kinerja Kegiatan ***Jumlah Kendaraan Bermotor*** per Mei 2023 100 Persen indeks
25. Capaian Target Perjanjian Kinerja Sasaran Kegiatan ***Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker*** Indikator Kinerja Kegiatan ***Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi*** per Mei 2023 100 Persen indeks
26. Capaian Target Perjanjian Kinerja Sasaran Kegiatan ***Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker*** Indikator Kinerja Kegiatan ***Jumlah Peralatan Perkantoran*** per Mei 2023 100 Persen indeks

27. Capaian Target Perjanjian Kinerja Sasaran Kegiatan ***Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker*** Indikator Kinerja Kegiatan ***Jumlah Gedung / Bangunan*** per Mei 2023 100 Persen indeks

**Kegiatan yang sudah dilaksanakan untuk mencapai target Perjanjian Kinerja**

| NO | NAMA KEGIATAN  | WAKTU & TEMPAT  | OUTPUT  |
|----|--|---|---|
| 1  | <b><i>Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan / Narapidana / Anak sesuai dengan standar</i></b>          | Dilaksanakan di Lapas Kelas IIA Sumbawa Besar dilakukan setiap hari 3x (Pagi, Siang dan sore menjelang malam) | Membagikan makanan melalui ompreng yang berjumlah sesuai jumlah warga binaan dan telah melalui control oleh petugas dapur serta perawat dan selalu memberikan sampel makanan pada Ka. UPT untuk memastikan kualitas |
| 2  | <b><i>Persentase Tahanan / Narapidana / Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif ) secara berkualitas</i></b> |   | Bekerja sama dengan RS Manambai Abdul Kadir untuk melakukan sosialisasi dan pemeriksaan Kesehatan warga binaan yang dipimpin oleh Dokter yang sekaligus   |

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
|   |  |  | berstatus sebagai dokter penanggung jawab klinik lapas   |
| 3 | <b><i>Persentase tahanan dan narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal</i></b> | Tidak pernah dilakukan pelayanan Kesehatan maternal, karena tidak terdapat warga binaan Wanita yang ditahan di Lapas Kelas IIA Sumbawa Besar | Tidak ada kegiatan pelayanan Kesehatan maternal karena tidak ada warga binaan Wanita didalam Lapas Kelas IIA Sumbawa Besar   |
| 4 | <b><i>Persentase Tahanan / Narapidana / Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani</i></b>                         | Tidak pernah melakukan perawatan gangguan mental, karena tidak terdapat warga binaan yang gangguan mental                                    | Tidak ada kegiatan pada warga binaan yang mengalami gangguan mental  |
| 5 | <b><i>Percentase tahanan / narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar</i></b>                       | Terdapat 13 orang warga binaan kategori lansia dilakukan kegiatan pemeriksaan Kesehatan dan pemisahan kamar khusus                           | Dilakukan kegiatan Posyandu lansia yang dipimpin oleh dokter penanggung jawab klinik lapas serta tim perawat lapas guna memastikan kondisi Kesehatan para wbp lansia. Dilakukan pemisahan kamar di blok khusus |

|   |  |   |   |
|---|--|---|---|
|   |  |   | rafflesia guna memudahkan pengontrolan dan sterilisasi potensi gangguan kesehatan   |
| 6 | <b><i>Persentase tahanan / narapidana / anak b€rkobutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar</i></b> | Tidak terdapat warga binaan Disabilitas   | Tidak terdapat warga binaan Disabilitas   |
| 7 | <b><i>Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)</i></b>    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terdapat 2 orang warga binaan HIV – AIDS</li> <li>2. 1 orang warga binaan TB</li> </ol> | <p>1.Telah dilakukan pemisahan di kamar isolasi bagi warga binaan yang mengidap penyakit HIV – AIDS dan TB</p> <p>2.Dilakukan perawatan khusus oleh tim perawat dengan penjadwalan pemberian obat sehari sekali dan pengontrolan malam</p> <p>3.dilakukan kerja sama dengan Dinas Kesehatan Kab. Sumbawa guna melakukan sosialisasi dan</p> |

|   |  |   |   |
|---|--|---|---|
|   |  |   | support untuk pemenuhan obat-obatan penunjang kesembuhan penyakit   |
| 8 | <b><i>Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian</i></b> | Terdapat 441 warga binaan yang memperoleh predikat memuaskan                      | Dilakukan penilaian melalui SPPN oleh para wali dan bekerja sama dengan tim di seksi binadik dengan sejumlah 441 dan seluruhnya mendapatkan predikat memuaskan  |
| 9 | <b><i>persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi</i></b>  | Terdapat 438 warga binaan yang memenuhi syarat untuk diusulkan mendapatkan remisi | 1, Telah dilaksanakan pengusulan remisi nyepi sebanyak 3 orang dan dilakukan penyerahan remisi nyepi pada 3 orang tersebut<br>2. telah diusulkan 435 warga binaan yang mendapatkan remisi khusus dan telah dilakukan penyerahan remisi khusus kepada ke 435 orang warga |

|    |   |  |   |
|----|---|--|---|
|    |   |  | binaan tersebut   |
| 10 | <i><b>persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi</b></i>  | Terdapat 142 warga binaan yang memenuhi syarat untuk diberikan hak integrasi                             | Dari 142 warga binaan yang memenuhi syarat mendapatkan hak integrasi diantaranya 72 orang mendapatkan integrasi 69 orang mendapatkan asimilasi rumah dan akan diintegrasikan. Seluruhnya telah diberikan hak integrasi dan asimilasi tersebut |
| 11 | <i><b>persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan</b></i> | Terdapat 162 warga binaan yang diusulkan sesuai syarat untuk mengikuti program Pendidikan Bahasa Inggris | Telah dilakukan kerja sama dengan Pusat Bahasa Universitas Teknologi Sumbawa, guna mengikutsertakan 162 warga binaan. Telah terlaksana kerja sama pelaksanaan tersebut dan melibatkan seluruh warga binaan yang diusulkan oleh lapas sumbawa  |

|    |  |  |  |
|----|--|--|--|
|    |  |  | besar sebagai peserta pelatihan Bahasa Inggris   |
| 12 | <b><i>Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin</i></b> |  |  |
| 13 | <b><i>Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi</i></b>           | Terdapat 20 warga binaan yang mengikuti pelatihan service ac bersertifikat | Lapas Kelas IIA Sumbawa Besar melaksanakan pelatihan service AC bersertifikat bekerja sama dengan CV.MR Cool dan seluruh peserta telah menyelesaikan kegiatan pelatihan tersebut dan berhasil mendapatkan sertifikat |
| 14 | <b><i>Persentase narapidana yang bekerja dan produktif</i></b>   | Dilakukan pembinaan perkebunan di beranggung dan SAE AI MAJA               | Terdapat 80 orang warga binaan yang mengikuti kegiatan kerja produktif   |
| 15 | <b><i>Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar</i></b>                                       | Terdapat 1 pengaduan yang dilakukan oleh masyarakat                        | Telah dilakukan penyelesaian pengaduan masyarakat melalui kanal  |

|    |  |  |   |
|----|--|--|---|
|    |  |  | <p>pengaduan yang disediakan Lapas Sumbawa Besar terkait kepastian informasi keluarga yang ditahan didalam lapas. Telah dilakukan komunikasi langsung kepada pelapor oleh tim pengaduan lapas sumbawa besar, dan telah diselesaikan pada saat itu juga.</p> |
| 16 | <p><b><i>Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah</i></b></p> | <p>Tidak terjadi gangguan kamtib</p>                         | <p>Dilakukan pengeledahan rutin yang menyasar seluruh kamar di blok hunian masing – masing. Ka. KPLP selalu melakukan briefing pada apel serah terima regu pengamanan. Dan selalu melaksanakan deteksi dini oleh tim KPLP</p>                               |
| 17 | <p><b><i>Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap</i></b></p>    | <p>Tidak ada warga binaan yang melakukan gangguan kamtib</p> | <p>Tidak ada warga binaan yang melakukan gangguan kamtib</p>  |

|    |  |   |  |
|----|--|---|--|
|    | <i>tata tertib oleh Tahanan / Narapidana / Anak pelaku gangguan kamtib</i>                                     |   |  |
| 18 | <i>Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas</i>                               | Tidak ada warga binaan yang melakukan gangguan kamtib | Tidak ada warga binaan yang melakukan gangguan kamtib                          |
| 19 | <i>Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasyarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu</i> | Setiap bulan pada tahun 2023                          | Telah melaporkan laporan keuangan setiap bulannya dari januari hingga mei 2023 |
| 20 | <i>Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan</i>  |   |  |
| 21 | <i>Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan</i>                                     |   |  |
| 22 | <i>Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan</i>                        |   |  |

|    |  |  |  |
|----|--|--|--|
|    | <i>tepat waktu</i>                                   |  |  |
| 23 | <i>Kegiatan Jumlah Layanan Perkantoran</i>           |  |  |
| 24 | <i>Jumlah Kendaraan Bermotor</i>                     |  |  |
| 25 | <i>Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi</i> |  |  |
| 26 | <i>Jumlah Peralatan Perkantoran</i>                  |  |  |
| 27 | <i>Jumlah Gedung / Bangunan</i>                      |  |  |

***Rencana Kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai / meningkatkan target Perjanjian Kinerja***

| NO | NAMA KEGIATAN  | WAKTU & TEMPAT  | OUTPUT  |
|----|--|---|---|
| 1  | <i>Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan / Narapidana / Anak sesuai dengan standar</i> | Dilaksanakan di Lapas Kelas IIA Sumbawa Besar dilakukan setiap hari 3x (Pagi, Siang dan sore menjelang malam) | Konsisten<br>Membagikan makanan melalui ompreng yang berjumlah sesuai jumlah warga binaan dan telah melalui control oleh petugas dapur serta perawat dan selalu memberikan sampel makanan pada Ka. UPT untuk memastikan |

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
|   |  |  | kualitas   |
| 2 | <b><i>Persentase Tahanan / Narapidana / Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif ) secara berkualitas</i></b>           |  | Selalu memperbaharui kerjasama dengan dinas Kesehatan kab.sumbawa dan rumah sakit manambai                                 |
| 3 | <b><i>Persentase tahanan dan narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal</i></b> | Tidak pernah dilakukan pelayanan Kesehatan maternal, karena tidak terdapat warga binaan Wanita yang ditahan di Lapas Kelas IIA Sumbawa Besar | Tidak ada kegiatan pelayanan Kesehatan maternal karena tidak ada warga binaan Wanita didalam Lapas Kelas IIA Sumbawa Besar |
| 4 | <b><i>Persentase Tahanan / Narapidana / Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani</i></b>                         | Tidak pernah melakukan perawatan gangguan mental, karena tidak terdapat warga binaan yang gangguan mental                                    | Tidak ada kegiatan pada warga binaan yang mengalami gangguan mental  |
| 5 | <b><i>Percentase tahanan / narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar</i></b>                       | Terdapat 13 orang warga binaan kategori lansia dilakukan kegiatan pemeriksaan Kesehatan dan pemisahan kamar khusus                           | Akan selalu melaksanakan program posyandu lansia secara berkelanjutan pada periode kedepannya                              |
| 6 | <b><i>Persentase tahanan / narapidana / anak bErkobatan</i></b>  | Tidak terdapat warga binaan Disabilitas  | Tidak terdapat warga binaan Disabilitas  |

|    |  |   |  |
|----|--|---|--|
|    | <i>khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar</i>  |   |  |
| 7  | <i>Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)</i> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terdapat 2 orang warga binaan HIV – AIDS</li> <li>2. 1 orang warga binaan TB</li> </ol> | Selalu mendatangkan pihak dinas Kesehatan kab.sumbawa guna memberikan sosialisasi dan dukungan obat-obatan |
| 8  | <i>Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian</i>        | Terdapat 441 warga binaan yang memperoleh predikat memuaskan  | Akan terus melakukan program pembinaan serta penilaian pada setiap warga binaan yang telah memenuhi syarat |
| 9  | <i>persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi</i>   | Terdapat 438 warga binaan yang memenuhi syarat untuk diusulkan mendapatkan remisi   | Akan selalu melakukan sinkronisasi data sdp guna memastikan update data                                    |
| 10 | <i>persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi</i>  | Terdapat 142 warga binaan yang memenuhi syarat untuk diberikan hak integrasi  | Akan selalu melakukan sinkronisasi data sdp guna memastikan  |

|    |   |  |   |
|----|---|--|---|
|    |   |  | update data   |
| 11 | <i>persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan</i>  | Terdapat 162 warga binaan yang diusulkan sesuai syarat untuk mengikuti program Pendidikan Bahasa Inggris | Akan tetap menjalin kerja sama Bersama Universitas setempat guna mendatangkan pelatihan yang beragam didalam Lapas                      |
| 12 | <i>Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin</i> | Tidak terdapat warga binaan yang melakukan Tindakan gangguan kamtib                                      | Tidak terdapat warga binaan yang melakukan Tindakan gangguan kamtib   |
| 13 | <i>Percentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi</i>           | Terdapat 20 warga binaan yang mengikuti pelatihan service ac bersertifikat                               | Akan menjalin Kerjasama dengan perusahaan setempat guna menghadirkan pelatihan bunga papan  |
| 14 | <i>Persentase narapidana yang bekerja dan produktif</i>   | Dilakukan pembinaan perkebunan di beranggang dan SAE AI MAJA   | Akan memaksimalkan jumlah warga binaan yang bisa asimilasi kebun dengan meningkatkan produktivitas SAE Ai maja dengan sector perkebunan |

|    |  |   |  |
|----|--|---|--|
| 15 | <b><i>Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar</i></b>   | Terdapat 1 pengaduan yang dilakukan oleh masyarakat   | Akan dibentuk layanan pengaduan Wablast  |
| 16 | <b><i>Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah</i></b>  | Tidak terjadi gangguan kamtib                         | Terus melakukan pengeledahan rutin setiap bulannya                             |
| 17 | <b><i>Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan / Narapidana / Anak pelaku gangguan kamtib</i></b> | Tidak ada warga binaan yang melakukan gangguan kamtib | Akan terus melakukan pemantauan melalui wali kamar dan wali keamanan           |
| 18 | <b><i>Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas</i></b>                                      | Tidak ada warga binaan yang melakukan gangguan kamtib | Akan terus melakukan pengawasan  |
| 19 | <b><i>Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakalan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu</i></b>         | Setiap bulan pada tahun 2023                          | Telah melaporkan laporan keuangan setiap bulannya dari januari hingga mei 2023 |
| 20 | <b><i>Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan</i></b>   |   |  |

|    |   |  |  |
|----|---|--|--|
| 21 | <i>Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan</i>                          |  |  |
| 22 | <i>Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu</i> |  |  |
| 23 | <i>Kegiatan Jumlah Layanan Perkantoran</i>  |  |  |
| 24 | <i>Jumlah Kendaraan Bermotor</i>  |  |  |
| 25 | <i>Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi</i>  |  |  |
| 26 | <i>Jumlah Peralatan Perkantoran</i>   |  |  |
| 27 | <i>Jumlah Gedung / Bangunan</i>   |  |  |

***Kendala / masalah / hambatan yang dihadapi dalam pemenuhan target Perjanjian Kinerja***

Selama proses pencapaian hasil, berbagai kendala dan permasalahan seringkali timbul sebagai faktor penghambat. Secara umum permasalahan yang menjadi hambatan yang berpengaruh terhadap efisiensi dan efektifitas capaian kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sumbawa Besar adalah sebagai berikut :

- Kapasitas atau isi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Sumbawa

Besar mengalami kondisi *overload*

- Umumnya petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sumbawa Besar terutama Petugas Pengamanan masih kurang dibanding porsetase isi Lembaga Pemasyarakatan.
- Lahan pertanian yang luas tidak diimbangi dengan alat dan sarana kerja memadai ditambah dengan petugasnya yang tidak pernah mengikuti diklat dan dukungan dari anggaran yang cukup.





## INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

| No | Kode KPPN | Kode BA | Kode Satker | Uraian Satker                        | Keterangan  | Kualitas Perencanaan Anggaran |                          | Kualitas Pelaksanaan Anggaran |                     |                      |                        |                | Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran | Nilai Total | Konversi Bobot | Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot) |
|----|-----------|---------|-------------|--------------------------------------|-------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|----------------|-------------------------------------|-------------|----------------|--|
|    |           |         |             |                                      |             | Revisi DIPA                   | Deviasi Halaman III DIPA | Penyerapan Anggaran           | Belanja Kontraktual | Penyelesaian Tagihan | Pengelolaan UP dan TUP | Dispensasi SPM | Capaian Output                      |             |                |  |
| 1  | 101       | 013     | 407644      | LEMBAGA PEMASYARAKATAN SUMBAWA BESAR | Nilai       | 100.00                        | 84.62                    | 99.34                         | 97.00               | 100.00               | 97.50                  | 100.00         | 100.00                              | 97.78       | 100%           | 97.78                                    |
|    |           |         |             |                                      | Bobot       | 10                            | 10                       | 20                            | 10                  | 10                   | 5                      | 25             |                                     |             |                |  |
|    |           |         |             |                                      | Nilai Akhir | 10.00                         | 8.46                     | 19.87                         | 9.70                | 10.00                | 9.75                   | 5.00           | 25.00                               |             |                |  |
|    |           |         |             |                                      | Nilai Aspek | 92.31                         |                          | 98.77                         |                     |                      |                        |                | 100.00                              |             |                |  |

**Disclaimer:**Sesuai [Perdirjen Perbendaharaan PER-5/PB/2022](#), indikator Revisi DIPA dan Penyerapan Anggaran tidak dihitung di Triwulan I 2022



## PAGU DAN REALISASI BELANJA

| No    | BA-Satker  | Nama Satker                             | KPPN | Ket        | Jenis Belanja |               |         |             |         |         |         |           |               | Total          |
|-------|------------|---|------|------------|---------------|---------------|---------|-------------|---------|---------|---------|-----------|---------------|----------------|
|       |            |   |      |            | Pegawai       | Barang        | Modal   | Beban Bunga | Subsidi | Hibah   | Bansos  | Lain-lain | Transfer      |                |
| 1     | 013-407644 | LEMBAGA PEMASYARAKATAN<br>SUMBAWA BESAR | 101  | PAGU       | 5,279,064,000 | 6,182,554,000 | 0       | 0           | 0       | 0       | 0       | 0         | 0             | 11,461,618,000 |
|       |            |   |      | REALISASI  | 1,929,006,288 | 2,162,354,260 | 0.00%   | 0.00%       | 0.00%   | 0.00%   | 0.00%   | 0.00%     | 0.00%         | 4,091,360,548  |
|       |            |   |      | PERSENTASE | (36.54%)      | (34.98%)      |         |             |         |         |         |           | (35.70%)      |                |
|       |            |   |      | SISA       | 3,350,057,712 | 4,020,199,740 | 0       | 0           | 0       | 0       | 0       | 0         | 7,370,257,452 |                |
| TOTAL |            |   |      | PAGU       | 5,279,064,000 | 6,182,554,000 | 0       | 0           | 0       | 0       | 0       | 0         | 0             | 11,461,618,000 |
|       |            |   |      | REALISASI  | 1,929,006,288 | 2,162,354,260 | (0.00%) | (0.00%)     | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%)   | (0.00%)       | (0.00%)        |
|       |            |   |      | PERSENTASE | (36.54%)      | (34.98%)      |         |             |         |         |         |           | (35.70%)      |                |
|       |            |   |      | SISA       | 3,350,057,712 | 4,020,199,740 | 0       | 0           | 0       | 0       | 0       | 0         | 7,370,257,452 |                |

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas kinerja suatu instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan kegiatan dan anggarannya, Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Sumbawa Besar telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) pada tahun 2022. LKJIP ini menyajikan informasi mengenai capaian kinerja dari Indikator Kinerja Utama (IKU) terpilih Direktorat Jenderal Pemasarakatan, kurun waktu Januari-Desember 2022 secara komprehensif sebagai wujud pertanggung jawaban publik (*public accountability*).

LKJIP ini disusun berdasarkan dokumen Perencanaan Kinerja dan dokumen Penetapan Kinerja Direktorat Jenderal Pemasarakatan, Divisi Pemasarakatan, dan Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan tahun 2022 yang mengacu sepenuhnya pada Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I tahun 2015-2022 dan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasarakatan 2015-2022 .Indikator yang diukur adalah capaian indikator kinerja utama (IKU) yaitu dengan membandingkan realisasi IKU dengan target IKU.

Secara umum, pencapaian kinerja Lembaga Pemasarakatan pada Tahun 2022 sudah cukup maksimal. Hal ini tidak lepas dari peran serta seluruh Seki yang terlibat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, program strategis serta partisipasi publik melalui berbagai kemitraan dengan pihak ketiga.

#### **Saran**

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan di atas maka guna meningkatkan kinerja Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Sumbawa Besar khususnya dalam pencapaian sasaran perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- Mengoptimalkan SDM yang ada dalam melaksanakan tugas pada Lembaga

Pemasyarakatan Kelas IIA Sumbawa Besar.

- Telah mengusulkan ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Barat untuk penambahan pegawai.
- Mengoptimalkan tenaga pengaman Lapas/Rutan yang ada dan memperketat pengawasan

Demikian laporan yang disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi dan penyusunan rencana kerja dan peningkatan kinerja pada tahun yang akan datang

Sumbawa Besar, 29 Mei 2023



Kepala,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

**M. FADLI**

**Nip.: 197805162000121001**

